

MEMAKNAKAN SECARA KRITIS *LINK AND MATCH* PADA BIDANG ILMU-ILMU HUMANIORA

Oleh: Arief Rohman ¹

Pendahuluan

Salah satu tema perbincangan dalam khasanah pembaharuan pendidikan di Indonesia saat ini adalah "*link and match*". Tema ini menarik banyak kalangan karena beberapa hal berikut. *Pertama*, ia hadir pada saat bangsa Indonesia berbenah diri di segala bidang tak kecuali pendidikan menuju tinggal landas dan memasuki PJP II. *Kedua*, gejala *mismatch* dan merosotnya efisiensi eksternal lembaga pendidikan yang ditandai dengan banyaknya pengangguran terdidik, yang membutuhkan pemecahan konkrit. Dan *ketiga*, *link and match* ini merupakan cetusan ide dari Mendikbud Wardiman Djojonegoro sendiri, sebagai orang nomor satu di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Dari alasan-alasan inilah perbincangan tentang *link and match* semakin berkembang.

Sebagai cetusan ide dan kemudian diimplementasikan, konsep *link and Match* mendapat tanggapan positif dalam rangka melakukan ikhtiar rekonstruksi dan reformulasi hubungan dunia pendidikan dengan dunia swasta atau dunia usaha/industri.

Link and Match menurut Mendikbud (1993: 41), dimaksudkan agar keduanya tersebut terjalin hubungan *reciprocal*. Dalam arti, dunia pendidikan diharapkan memiliki keterkaitan dan kesepadanan atau lebih jauh lagi memiliki hubungan fungsional dengan dunia usaha/industri, mulai dari tahap perencanaan sampai pada implementasi dan evaluasi program. Di pihak lain, dunia usaha/industri dituntut untuk lebih

membuka diri terhadap dunia pendidikan kita, baik dalam arti sikap maupun tindakan nyata termasuk menjadi tempat magang dan praktek lapangan bagi para peserta didik.

Seiring dengan ramainya banyak ahli mendiskusikan-kembangkan, para praktisi memantapkan penerapan, serta masyarakat pendidikan lainnya mendukung dan *taklid* akan pelaksanaan *link and match*, maka pertanyaan yang muncul adalah apakah kalangan pengusaha/industri kita sampai saat ini telah cukup kesadaran untuk ambil bagian dan melihat peluang keuntungan dengan menjalin hubungan *reciprocal* dengan lembaga pendidikan tertentu? Sebaliknya, apakah dunia pendidikan kita secara umum telah memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk memformulasikan diri dan menggaet mereka yang sungguh-sungguh motif dan visinya berbeda?

Persoalan yang disebut pertama tadi, nampaknya bisa diatasi sebagaimana teorinya *Bennis*, *Benne*, dan *Chin* (Suyanto, 1995) dengan istilah *Power-Coercive Strategies*, yakni strategi agar pemerintah menciptakan berbagai instrumen peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan untuk melakukan intervensi dan regulasi terhadap dunia usaha/industri agar ia mau menyediakan diri dan membuka diri untuk keperluan-keperluan pendidikan. Tentu saja tidak hanya sebatas pembuatan peraturan *imperatif* (yang mewajibkan) belaka, tetapi dibarengi dengan strategi penjelasan secara rasional akan berbagai keuntungan empiris yang akan diperoleh dunia usaha/industri; yang diistilahkan dengan *Empirical-Rational Strategies*. Sedang persoalan kedua, nampaknya akan sulit diatasi dan membutuhkan waktu agak panjang terutama yang dialami oleh para pelaku penyelenggara pendidikan pada level tertentu yang secara intelektual memang kurang mampu mengimplementasikan *link and match* ini secara cerdas.

Paling tidak persoalan kedua ini menyangkut: (1) Seberapa jauh lembaga pendidikan kita mampu melakukan tindakan-tindakan agresif untuk menemukan pasangan (*partnership*) dari lembaga ekonomi/industri yang relevan? (2) Khusus untuk lembaga pendidikan yang mengajarkan ilmu humaniora pertanyaannya berupa: bagaimana ilmu humaniora ini bisa melakukan *linking* dan *matching*? Pertanyaan terakhir ini

muncul tatkala terjadi kebingungan para penyelenggara pendidikan ilmu humaniora di tengah-tengah ramainya orang-orang *gandrung* dengan jargon *link and match*.

Hal yang terakhir ini sebenarnya tidak perlu dirisaukan dan digeneralisir seperti ilmu-ilmu terapan/teknik, mengingat ilmu humaniora secara ontologis dan epistemologi kurang *pas* untuk dimaknakan sebagaimana ilmu-ilmu terapan/teknik tersebut. Oleh karenanya, kritis *link and match* pada bidang ilmu humaniora perlu untuk diberikan klarifikasi secara cermat.

Esensi *Link and Match* dan Ilmu Humaniora

Kebijakan mengenai keterkaitan dan kesepadanan (*link and match*), merupakan suatu kebijakan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang dikembangkan untuk meningkatkan relevansi pendidikan. Yaitu relevansi (kesesuaian) keluaran pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja, dunia usaha dan industri pada khususnya; serta dengan kebutuhan pembangunan pada umumnya.

Link atau keterkaitan memiliki arti, program-program pendidikan supaya mempunyai pertautan yang jelas dengan kebutuhan pasar. Pasar di sini dapat dimaksudkan dalam suatu perspektif luas yang sejajar dengan konsep *Educational Constituency*, yaitu berbagai pihak yang memakai dan menikmati jasa atau yang berkepentingan dengan sistem pendidikan (Sarason, 1985). *Educational Constituency* menurut Sarason dapat meliputi murid, guru, administrator, masyarakat sekitar, pemerintah, dan sistem ipoleksosbud.

Match menurut Ace Suryadi (1994: 76) sebagai kesepadanan yang artinya, program pendidikan yang sudah terkait dengan berbagai kepentingan tersebut harus disamakan dengan jumlah, tingkat mutu, atau nilai yang dituntut atau dipersyaratkan oleh - termasuk perubahan kepentingan yang akan selalu terjadi - konstituensi pendidikan. Jadi pengertian *match* disini memiliki bobot yang lebih luas dan mendalam. Dalam tindakan lebih operasional dapat digambarkan *link* diwujudkan

dalam perencanaan dan pengelolaan sedang *match* dijemakan di dalam pelaksanaan program dan penilaian. *Link* cenderung lebih berfungsi sebagai bahasa perencanaan, sedang *match* lebih merupakan bahasa penilaian atau pengukuran.

Dari sisi ekonomi (*economy side*) dengan analisis ketenagakerjaan, maka *link and match* berusaha menyeimbangkan antara pertambahan jumlah angkatan kerja terdidik sebagai *supply* dengan pertumbuhan peluang kesempatan kerja sebagai *demand* (Ace Suryadi, 1994: 81). Dari dimensi sosial-pembangunan, *link and match* berusaha menyeimbangkan antara keluaran pendidikan sebagai sumber daya manusia pembangunan dengan kebutuhan-kebutuhan pembangunan secara umum. Mengenai masalah ini telah diagenda oleh Mendikbud sebagai permasalahan khusus yang dialami selama PJP I, bahwa: "Selama PJP I diantara permasalahan yang dihadapi dalam dunia pendidikan kita adalah belumsemua program pendidikan belum berorientasi kepada kebutuhan pembangunan" (Mendikbud, 1993). Sedang dari segi teknologi, *link and match* berupaya menyejajarkan antara proses dan keluaran pendidikan teknologi dengan keadaan kemajuan teknologi dan penemuan-penemuan terbarunya, sehingga diharapkan keluaran pendidikan teknologi mampu terserap ke dalam kegiatan rekayasa teknologi bahkan mampu juga membuat lompatan penemuan yang lebih canggih. Dengan demikian *link and mtach* sendiri esensinya, menemukan atau meluruskan relevansi antara proses dan keluaran pendidikan terhadap segenap kebutuhan pembangunan. Lebih luas lagi, *link and match* mengandung makna esensial bahwa perlunya relevansi antara proses dan keluaran pendidikan dengan segenap kebutuhan masyarakat.

Bila pengertiannya demikian sebagaimana disebut di atas, maka lembaga pendidikan mana pun dan kelompok atau bidang ilmu apa pun termasuk bidang ilmu *humaniora*, sesuai kebijakan Mendikbud perlu dilakukan *linking* dan *matching*. Jadi bukan hanya kelompok ilmu eksakta maupun ilmu teknik. Meskipun yang terjadi sekarang tampak

nyata adalah kedua ilmu itu dengan diterapkannya sistem ganda (*dual System*), namun ilmu humaniora bukannya tidak bisa. Lalu persoalannya, bagaimana kita melakukan *linking* dan *matching* untuk ilmu humaniora?

Humaniora: Meningkatkan Keluhuran Peradaban

Sebagaimana diketahui bahwa istilah *humaniora* berasal dari bahasa latin baru yang dalam bahasa Inggris searti dengan kata *the humanities*. Kedua kata tersebut merupakan kata turunan dari bahasa latin kuno *humanus* yang berarti: manusiawi, berbudaya, dan halus.

Humaniora (Inggris: *the humanities*) merupakan cabang pengetahuan yang berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan segenap ekspresi manusiawi manusia. Atau oleh *Elwood* didefinisikan sebagai seperangkat sikap dan perilaku moral manusia terhadap sesamanya. Sehingga dengan mempelajari humaniora ini seseorang dapat: (1) menjadi berbudaya dan berwatak yang mampu berkomunikasi dengan al Khaliq sang pencipta; (2) dapat berkomunikasi dengan sesama manusia; dan (3) dapat pula berkomunikasi dengan alam lingkungan kita. (Dar-diri, 1985: 3-4).

Di dalam *Encyclopaedia Britannica* (1982), menyebutkan, humaniora terbagi atas sepuluh cabang yaitu:

1. bahasa, baik klasik maupun modern,
2. ilmu bahasa,
3. kesusasteraan,
4. sejarah,
5. ilmu hukum,
6. filsafat,
7. arkeologi,
8. sejarah (tertentu),
9. teori, praktek dan kritik seni,

10. aspek-aspek mengenai ilmu-ilmu sosial yang memiliki isi humanistik.

Dewasa ini arus besar pemikiran (*mainstream*) dalam wacana pembaruan pendidikan, mendorong cabang-cabang ilmu humaniora untuk melakukan *linking* dan *matching* dengan situasi dan konteks masyarakat. Dalam arti kata, ilmu-ilmu humaniora tidak hanya dituntut untuk menghasilkan produk-produk pemikiran nilai yang memiliki kadar kebenaran sesaat akan tetapi jauh ke depan secara radikal dan universal.

Kalau *link and match* untuk bidang-bidang ilmu eksakta dan ilmu teknik lebih mengarah pada aspek kebudayaan material (*material culture*) masyarakat seperti pembangunan pabrik industri, alat transportasi, alat telekomunikasi, pembuatan infra-struktur ekonomi, dan lain-lain, maka *link and match* untuk bidang ilmu-ilmu humaniora mengarah pada aspek kebudayaan immaterial (*immaterial culture*) seperti nilai-nilai, norma, tradisi dan kebiasaan, prinsip-prinsip, serta kepercayaan yang ada dalam masyarakat. Sebagaimana disebut Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi (Soerjono Soekanto, 1982: 167), kebudayaan masyarakat itu terbagi atas dua bagian: *pertama*, kebudayaan yang dihasilkan dari aktivitas karya masyarakat yang disebut kebudayaan jasmani (*material culture*), sedang yang *kedua*, kebudayaan yang dihasilkan dari aktivitas cipta dan rasa masyarakat yang disebut kebudayaan rohaniah (*spiritual* atau *immaterial culture*). Oleh karenanya, dalam konteks ini ilmu-ilmu eksakta dan teknik lebih dekat dengan yang pertama, sedang ilmu humaniora memiliki relevansi dengan yang kedua. Meskipun demikian pada konteks tertentu terkadang kedua hal tersebut bisa dibalik.

Dalam mengembangkan ilmu humaniora para ahli selalu berpijak pada dua dimensi kehidupan, yakni dimensi *realitas* dan dimensi *idealitas*. Dimensi realitas memberikan segenap data empirik tentang dunia, alam, dan manusia kepada para ahli untuk menghasilkan produk-produk teori induktif, sedang dimensi idealitas merupakan wilayah atau

kawasan dimana para ahli melakukan refleksi dan perenungan secara mendalam untuk menghasilkan produk-produk teori, hukum, atau gagasan tentang dunia, alam, dan manusia tersebut yang bersifat deduktif. Karena dua dimensi inilah, maka ilmu humaniora suatu saat dekat dengan kebudayaan material dan pada saat yang lain dekat dengan kebudayaan immaterial.

Mengenai penekanan *link and match* untuk ilmu humaniora itu lebih mengarah pada aspek kebudayaan immaterial bukan pada aspek kebudayaan material adalah didasarkan pada: (1) obyek *formal* ilmu humaniora yang merupakan esensi dari ilmu tersebut, yaitu nilai-nilai kemanusiaan dan ekspresi manusiawi manusia, atau oleh *Elwood* dikatakan sebagai nilai-nilai sikap dan perilaku moral. Walaupun obyek *material* ilmu humaniora ada banyak kesamaan dengan ilmu eksakta dan teknik yaitu data-data empirik tentang dunia, manusia, dan alam, akan tetapi pada objek formal berbeda. Sehingga bila para ahli ilmu humaniora mendekatkan diri pada dimensi realitas atau aspek kebudayaan material, maka hal tersebut hanyalah upaya mereka untuk melihat objek material-nya bukan pada cara melihatnya. (2) Ilmu humaniora itu sendiri memang memiliki tujuan agar seseorang dapat mempunyai budaya dan watak untuk berkomunikasi dengan Tuhan sang pencipta, sesama manusia, serta alam lingkungannya. Sehingga nilai-nilai budaya dan watak untuk bisa berkomunikasi inilah yang ditekankan berkaitan dengan *link and match*.

Dalam kehidupan sehari-hari, upaya *link and match* ilmu humaniora dituntut untuk selalu melakukan survivalisasi dan sosialisasi nilai-nilai luhur yang ada di masyarakat, bersamaan dengan itu pula ilmu humaniora dituntut untuk mampu menghasilkan produk-produk nilai baru yang lebih fungsional dan memiliki nilai kebenaran secara universal. Kemajuan hasil dari aspek kebudayaan material harus diimbangi dengan kemajuan kebudayaan immaterial. Kemajuan akibat dari penemuan-penemuan teknologi dan akibat dari hasil pembangunan fisik,

maka pembangunan nilai-nilai atau penguatan nilai-nilai sangat perlu diupayakan. Dengan demikian peradaban yang dibangun oleh umat manusia pada umumnya dan oleh bangsa Indonesia khususnya akan memiliki keluhuran. Kemakmuran material (lahir) dan kemakmuran spiritual (batin) akan lebih sejajar. Tetapi apabila keduanya kurang sejajar atau bahkan timpang, maka menurut Ogburn dan Nimkoff (1964: 728) akan terjadi *cultural lag*.

Membangun Relevansi Secara Menyeluruh

Disadari bersama bahwa upaya untuk melakukan *link and match* bidang ilmu-ilmu humaniora sekarang ini masih belum jelas, disamping memang masih ada yang kebingungan. Lembaga pendidikan ilmu eksakta dan teknik telah melakukan langkah-langkah taktis strategis sehubungan dengan diluncurkannya kebijakan sistem ganda (*dual system*), namun lembaga pendidikan ilmu humaniora nampaknya masih belum jelas.

Adapun yang sudah tampak jelas upaya melakukan *link and match* atau membangun terciptanya relevansi yang baik oleh lembaga pendidikan ilmu-ilmu humaniora adalah pada penataan level struktur-organisasional, yaitu pengurangan *student body* lembaga pendidikan tersebut yang dirasa telah mengalami *overproduction* (kelebihan jumlah lulusan). Sedangkan penataan pada level fundasional masih belum memperoleh penekanan secara sungguh-sungguh, misalnya soal metodologinya, nampaknya pada bidang ini membutuhkan suatu paradigma yang lebih tepat dan lebih mampu menyelesaikan masalah. Satu kasus misalnya, ilmu yang mengajarkan nilai-nilai moral (PMP, Etika, Sastra, dan lain sebagainya), sampai saat ini belum mampu sepenuhnya untuk mengurangi laju kenakalan dan dekadensi moral anak-anak serta remaja. Hal ini mengindikasikan masih perlunya dicari *upaya-upaya metodologis* untuk menggali sumber-sumber nilai yang sekaligus mampu diso-

sialisasikan kepada para anak dan remaja kita secara tepat.

Upaya-upaya yang lain sebenarnya masih banyak untuk meningkatkan relevansi lembaga pendidikan ilmu humaniora, melalui berbagai cara dan pada level mana saja guna memperoleh sebuah rumusan paradigma yang lebih baik secara menyeluruh. Tentu saja hal ini dilakukan melalui proses yang sungguh-sungguh dan hati-hati secara bertahap.

Daftar Pustaka

Ace Suryadi. 1994. *Pengembangan Sumberdaya Manusia Menjelang PJP II*. Jakarta: Prisma LP3ES No. 3 Tahun XXIII Maret 1994

Ahmad Dardiri. 1985. *Humaniora, Filsafat dan Logika*. Jakarta: CV Rajawali

Encyclopaedia Britannica, 1982. William Benton Publisher, Volume 8

Mendikbud. 1993. *Laporan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kepada Bapak Presiden dalam Rangka Pembukaan Rakernas Depdikbud Tahun 1993*. Jakarta: Jurnal Pendidikan ISPI No. 12 September 1993

. *Pengarahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Rakernas Depdikbud Tahun 1993*. Jakarta: Jurnal Pendidikan ISPI No. 12 September 1993

Ogburn, William F. and Nimkoff, Meyer F. 1964. *Sociologi Fourth Edition*. Boston: A Pfeffer and Simons International University Edition, Toughton Mifflin Company

Soerjono Soekanto. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: CV Rajawali

Suyanto. 1995. *Agenda dan Persoalan Esensial Pendidikan Nasional*. Kompas Halaman 4, Selasa 2 Mei 1995